



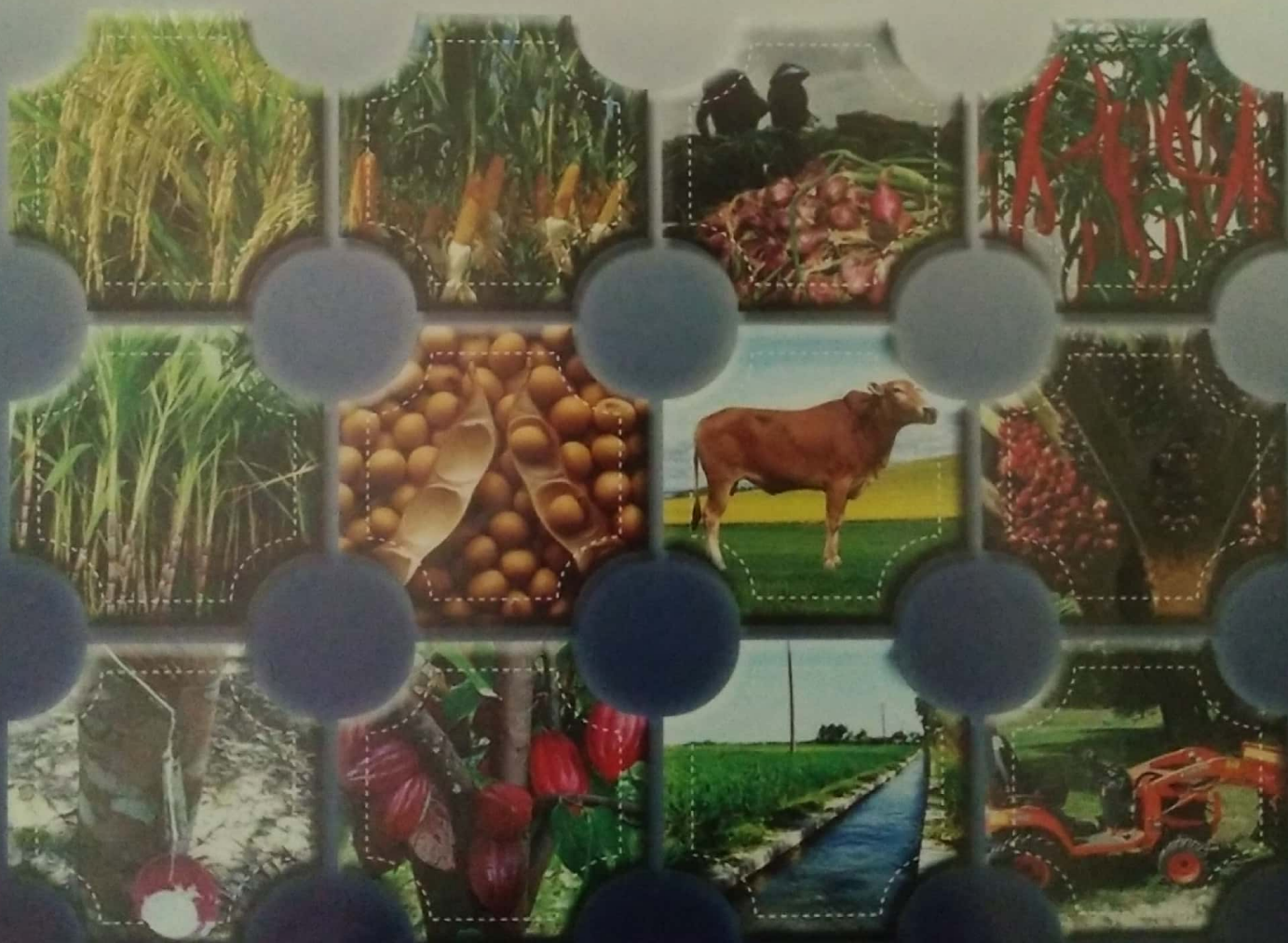
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2021

KAMIS,
EDISI ;

21 OKTOBER 2021
00226467/GBP/X/2021

KLIPING

Berita Pertanian



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harsono RM, No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Email : humas-ip@pertanian.go.id, Website : www.pertanian.go.id

GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

KAMIS, 21 OKTOBER 2021

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. HORTIKULTURA :
 - Kementan dan Pemda Siapkan 1 Juta Bibit Jeruk (K)..... 1
 - Mentan Lepas Ekspor Jeruk Purut ke Perancis dan Belanda (MI) 2
2. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN :
 - BUMN Pangan Serap Telur Peternak Lokal (RM)..... 3-4
3. PERKEBUNAN :
 - Penghiliran Produk Agro Terus Ditingkatkan (MI)..... 5
 - ISPO Kebun Petani Sawit Diselaraskan dengan PSR (ID)..... 6
4. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN :
 - Gubernur Sumsel : Dukung Program Lumbung Pangan (RM).. 7
5. KETAHANAN PANGAN :
 - Bulog Minta Pembenahan Tata Kelola CBP (BI)..... 8
 - Ketahanan Pangan Jadi Pilar Penting bagi Indonesia (MI)..... 9-10
6. PERTANIAN UMUM :
 - Pertanian Menjadi Penyelamat, Ekonomi Pulih, Bangsa Kuat (MI) 11-12
 - Benahi Kelembagaan untuk Perkuat Petani dan Nelayan (K)... 13-14

II. PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

ARTIKEL DAN OPINI :

- Jab dan " Hook " Perdagangan (K)..... 15
- Harga Pangan Global dan Ketahanan Pangan Nasional (K)..... 16-17

oooooooo O ooooooooo

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☒ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 20/10/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 1/1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☒ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

PERTANIAN

Kementan dan Pemda Siapkan 1 Juta Bibit Jeruk

BATU, KOMPAS — Pemerintah akan membagikan bibit jeruk unggul tahan penyakit dan berdaya saing tinggi terhadap buah impor kepada petani di seluruh Indonesia. Untuk mendukung hal itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan bersama pemerintah daerah menyiapkan 1 juta bibit jeruk unggul.

Hal itu dikatakan Syahrul di sela-sela Gelar Teknologi Inovatif Perbenihan Jeruk Bebas Penyakit Mendukung Pengembangan Kawasan, di Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP)-Balai Penelitian Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro) II Puntun, Batu, Jawa Timur, Selasa (19/10/2021). Dalam kesempatan ini, Syahrul secara simbolis melepas ekspor jeruk purut varietas Puri Agrihorti ke Perancis dan Belanda sebanyak 4 ton per bulan senilai Rp 680 juta.

Jeruk ini punya rasa asam dan kulit aromatik dengan berat buah 38-56 gram. Puri Agrihorti memiliki ukuran daun lebih besar dan produksi lebih tinggi.

Jeruk purut rupanya sudah mendapat pasar di luar negeri. Dunia internasional, menurut Mentan, punya persepsi jeruk purut Indonesia punya kualitas baik. "Saya akan perkuat komoditas untuk disiapkan budidaya eksportnya. Integratornya sudah ada. Besok kita dorong sambil kita pecahkan kendala (ekspor) apa," katanya.

Presiden Joko Widodo, kata Syahrul, telah meminta agar produk pertanian terus ditingkatkan untuk kebutuhan nasional dan diekspor. Sektor pertanian terbukti tahan banting dalam kelesuan ekonomi global akibat pandemi Covid-19.

Menurut Syahrul, Kota Batu menjadi sumber benih sehingga peran pemda beserta Balitbang Kementan sangat diperlukan. Mentan juga melepas pengiriman bantuan 100.000 bibit jeruk bebas penyakit kepada petani untuk pengembangan kawasan. Berdasarkan data Badan Pusat Sta-

tistik 2021, jeruk, yang produksi tahun 2020 mencapai 2,72 juta ton, menjadi buah terbanyak kedua yang dikonsumsi di Indonesia setelah pisang. K/20/10/11

Kepala Balitbang Kementan Fadry Djufray mengatakan, lima tahun terakhir telah disebar 21,4 juta bibit jeruk bebas penyakit ke seluruh provinsi di Indonesia. Ke depan, pihaknya akan menyiapkan bibit unggul hingga 1 juta bibit. Penyiapannya dilakukan, baik melalui kultur jaringan maupun teknik yang lain. "Nanti kita pilih beberapa jenis unggul. Jeruk purut Puri Agrihorti ini salah satu jeruk premium yang sudah diekspor rutin ke beberapa negara," katanya.

Secara nasional, kontribusi Balitbang Kementan terhadap luas areal jeruk nasional mencapai 73.083 hektar yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari luasan itu, 73 persen dimulai dari IP2TP Puntun. Balitbang Kementan punya 271 jenis jeruk dari seluruh Indonesia dan introduksi dari luar negeri. Setidaknya, 74 jenis jeruk sudah dilepas sebagai varietas unggul baru, di antaranya keprok Batu 55 dari Batu, keprok Garut (Jawa Barat), dan keprok Grabag (Magelang).

Kendala pengembangan

Terkait pengembangan jeruk, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan, hingga kini ada 285 hektar lahan di Batu dengan 153.000 batang pohon yang memproduksi 25,1 ton jeruk per tahun. Untuk pengembangan pun masih ada kendala, khususnya bibit yang telah tua dan mati.

Menurut Dewanti, pandemi Covid-19 cukup berpengaruh terhadap perekonomian Kota Batu, yang maju berkat sektor jasa pariwisata. "Namun, kami masih bersyukur karena sektor pertanian kebal dari pandemi dengan angka pertumbuhan positif 1,03-1,71 persen. Meski di tengah pandemi kami masih bisa bertahan," katanya. (WER)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☒ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Mentan Lepas Ekspor Jeruk Purut ke Prancis dan Belanda

MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) melepas ekspor jeruk purut hasil panen petani Kota Batu, Jawa Timur, ke Prancis dan Belanda. Mentan SYL mengapresiasi ekspor jeruk rutin saban bulan yang memiliki pasar internasional.

"Hari ini kita lepas eksponya ke Prancis dan Belanda, permintaan ekspor jeruk purut ini cukup besar. Pemerintah Presiden Jokowi ialah selain meningkatkan produksi untuk pemenuhan

kebutuhan sendiri, juga untuk melipatgandakan ekspor," tegas Mentan SYL dalam Gelar Teknologi Inovatif Perbenihan Jeruk Bebas Penyakit Mendukung Pengembangan Kawasan di Kota Batu, kemarin. 11/20/10/11

SYL mendorong pengembangan komoditas hortikultura berbasis kawasan untuk mendongkrak volume ekspor hingga tiga kali lipat.

"Jeruk merupakan komoditas Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif dan

permintaan ekspor cukup tinggi dan kontinu," katanya.

Karena itu, Kementan akan terus mengembangkan potensi besar itu sekaligus meningkatkan bibit jeruk unggul sampai 1 juta bibit. Yang dipacu itu, salah satunya jeruk purut yang telah memiliki pasar dan permintaan ekspor rutin setiap bulannya.

Untuk itu, mentan menekankan gelar teknologi inovatif perbenihan jeruk bebas penyakit mendukung pengembangan kawasan.

"Oleh karena itu, hari ini selain gelar teknologi juga dilakukan ekspor ke beberapa negara. Saya memperkuat dengan pengembangan budi daya berbasis ekspor dan integrator pun kita siapkan," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, SYL meminta pengembangan kawasan jeruk unggul 1 juta bibit sehingga hasil panen nanti terserap pasar dan permintaan restoran secara luas

dipenuhi dari Indonesia.

Kepala Badan Litbang Pertanian Kementan Fadjry Djufray menyatakan siap mengembangkan budi daya 1 juta bibit jeruk unggulan dengan jenis tertentu yang memiliki potensi produksi dan ekspor tinggi. Kota Batu dijadikan sebagai pusat pembibitan.

Balai Penelitian Jeruk dan Buah Subtropika Batu juga mengembangkan komoditas lengkeng, apel, stroberi, dan beberapa komoditas tropika lainnya. (BN/N-1)

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 21/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 6 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Harganya Sudah Mulai Merangkak Naik BUMN Pangan Serap Telur Peternak Lokal

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turun tangan menyerap telur peternak kecil. Langkah ini diharapkan bisa menstabilkan harga komoditas tersebut yang belakangan ini merosot tajam.

SEJAK Senin (11/10) hingga Kamis (14/10), harga telur berkisar Rp 14.000-17.000 per kilogram (kg).

Harga tersebut jauh di bawah harga acuan telur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.07/2020 sebesar Rp 19.000-21.000 per kg. Namun pada Jumat (15/10), harga telur mulai membaik di level Rp 19.000 per kg di kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

PT RNI (Persero) yakin, kenaikan harga telur buah hasil turunan BUMN klaster pangan dalam mendukung stabilitas harga.

Direktur Utama RNI Arief Prasetyo Adi mengatakan, sebagai bagian dari BUMN Klaster Pangan, pihaknya selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan

petani, peternak dan nelayan. Untuk itu, RNI membantu serap produksi telur. (AM. 10)

"Menyerap produksi telur menjadi bagian dari kontribusi kami membantu peternak dari anjloknya harga telur," jelas Arief dalam keterangan resmi, Jumat (15/10).

Upaya serapan produksi telur ini juga diberlakukan kepada seluruh insan BUMN Klaster Pangan, untuk turut serta menjadi bagian membantu peternak. Ini dilakukan dengan kerja sama Kementerian Pertanian (Kementan) melalui ajakan aksi bela beli telur peternak kepada karyawan.

Selain itu, Arief bilang, melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), RNI turut merealisasikan bantuan pangan telur kepada yayasan panti jompo, panti asuhan yatim piatu, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), pedagang asongan, komunitas ojek online di area Jakarta dan sekitarnya.

"Dengan begitu, kami turut mengajak masyarakat meningkatkan konsumsi telur," ujarnya.

Kemudian, diadakan pula sinergi strategis antara Kementerian Koordinasi Perekonomian, RNI dan sekitar 65 institusi negara. Termasuk badan, lembaga, hingga komisi dan peme-

rintah provinsi.

Salah satu anggota BUMN Klaster Pangan, PT Berdikari (Persero), siap menyerap ribuan ton telur ayam ras dari peternak ayam mandiri (UMKM). Penyerapan telur yang telah berlangsung akan dilaksanakan secara bertahap.

"Ini langkah taktis dalam rangka mendorong harga pembelian di tingkat peternak, agar sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP)," kata Direktur Utama Berdikari Harry Warganegara di Jakarta, Jumat (15/10).

Seluruh pihak terkait diimbau dapat menyerap telur dari peternak melalui Berdikari untuk dapat berpartisipasi dalam gerakan solidaritas ini. Penyerapan telur yang masif ini dilaksanakan secara bertahap dari peternak rakyat.

"Dengan sinergi seluruh pihak menyerap telur melalui Berdikari, kami yakin HAP dapat tercapai," imbuhnya.

Perlu diketahui, setidaknya ada empat langkah strategis dari pemerintah dalam menghadapi gejolak harga telur ayam ras belakangan ini. Mulai dari penyerapan dan distribusi telur, peningkatan produktivitas jagung, pengelolaan pasca panen, hingga membuka akses pasar.

Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong industri pengolahan telur dan korporasi peternak. Dengan industrialisasi

produk turunan dan perubahan pola kerja peternak tradisional ke arah yang lebih modern.

Diharapkan, ekosistem pangan nasional yang kohesif dari hulu ke hilir dapat tercapai dengan efisien dan efektif, serta memberikan dampak positif yang maksimal bagi peternak serta masyarakat.

Atur Tata Kelola

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas berpendapat, kishrunya peternak dengan harga telur yang anjlok, lantaran tata kelola yang kurang pas. Mengingat, siklus kenaikan harga telur selalu sama.

Andreas menjabarkan, harga tertinggi telur itu telah terjadi Juli 2021, kemudian mulai turun Agustus, sampai titik terendah di September-Oktober. Namun, pada November dipas-tikan akan mulai naik dan puncaknya harga tertinggi sampai Februari tahun depan.

"Selalu siklusnya seperti itu, kadang kurang kita pahami. Turun bukan hanya semata-mata imbas kenaikan harga pakan dan rendahnya daya beli, juga terjadi tata kelola yang kurang tepat,"

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 21/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

terang Andreas kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Sebenarnya, imbuh Andreas, untuk menangani anjloknya harga telur dan daging ayam itu cukup sederhana, karena relatif pasti polanya. Berbeda dengan cabe yang tidak pasti.

"Prinsipnya, kalau sesuatu itu sudah relatif pasti, tata kelolanya sebenarnya lebih sederhana. Dalam arti, mampu diantisipasi. Ketika harga naik bisa diantisipasi dengan menggelontorkan stok," kata Andreas.

Misalnya, produksi jagung sebagai sumber pakan ayam, yang termasuk siklus panennya juga relatif pasti.

"Sekarang heboh harga jagung naik, namun saya pastikan bulan depan sudah mulai turun lagi, karena masuk masa panen kedua. Setelah panen pertama April," tuturnya.

Untuk itu, hal yang mendasar dalam mengatasi kenaikan harga telur dan pangan lainnya, adalah mempelajari pola yang relatif pasti itu. Sehingga bisa diterapkan dalam kebijakan nasional. "Misalnya, lewat Peraturan Menteri Perdagangan," sarannya. ■ DWI

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 21 / 10 / 2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Penghiliran Produk Agro Terus Ditingkatkan

KEMENTERIAN Perindustrian terus meningkatkan program hilirisasi atau penghiliran berbasis sumber daya alam, termasuk di sektor agro, agar dapat terus memacu nilai tambah ekonomi bahan baku lokal tersebut. Salah satu sektor yang dikembangkan ialah industri pengolahan minyak kelapa sawit.

Melalui kebijakan penghiliran, pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi pusat produsen produk turunan minyak sawit di dunia pada 2045. Itu juga akan membuat Indonesia menjadi penentu harga minyak sawit mentah (CPO) global. Indonesia saat ini menguasai pasar ekspor CPO sebesar 55%.

Di samping itu, kenaikan harga komoditas CPO diharapkan bisa menjadi peluang untuk pengembangan industri hilirnya. Hal itu akan menimbulkan *multiplier effect* yang luas bagi perekonomian nasional, khususnya penerimaan devisa negara dan kesejahteraan masyarakat.

"Selama ini, hilirisasi dapat bermanfaat dalam meningkatkan nilai tambah terhadap perekonomian nasional, di antaranya peningkatan pada investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan industri manufaktur di dalam negeri," tutur Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita seperti dikutip dari

siaran pers, kemarin.

Menurut Agus, dengan sumber daya alam berlimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara eksportir berbagai produk berbasis agro, mineral, migas, dan batu bara. "Di sektor industri agro, misalnya, Indonesia berhasil melakukan hilirisasi minyak sawit mentah," ujarnya.

Dalam kurun 10 tahun, ekspor produk turunan kelapa sawit meningkat signifikan, dari 20% pada 2010 menjadi 80% pada 2020. Bahkan, saat ini 168 jenis produk hilir CPO telah mampu diproduksi industri di dalam negeri untuk keperluan pangan, fitofarmaka/nutrisi, bahan kimia/oleokimia, hingga bahan bakar terbarukan/biodiesel *fatty acid methyl esters* (FAME). Pada 2011, hanya ada 54 jenis produk hilir CPO.

Plt Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menyebutkan program yang telah dijalankan Kemenperin terkait dengan penghiliran berbasis minyak sawit (CPO/CPKO), antara lain dengan mempertahankan kebijakan tarif pungutan ekspor secara progresif berdasarkan harga CPO internasional dan rantai nilai industri. *M. G*

"Tarif pungutan ekspor untuk bahan baku CPO/CPKO jauh lebih tinggi daripada produk *intermediate* dan produk hilir," jelasnya. (Mir/E-3)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☒ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL	24/10/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN	7/1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI	☒ Berita
☒ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya		☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan		☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post		☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika			☐ Pojok/Karikatur

ISPO Kebun Petani Sawit Diselaraskan dengan PSR

JAKARTA - Pemerintah mengakui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada kebun para petani sawit memiliki sejumlah tantangan. Sesuai Perpres No 44 Tahun 2020, petani sawit juga wajib memiliki ISPO lima tahun sejak aturan itu diterbitkan. Untuk meminimalkan tantangan itu, penerapan ISPO pada petani akan diselaraskan dengan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Deputi II Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, Indonesia adalah produsen sawit terbesar dunia, menguasai 50% pangsa pasar global. Industri sawit nasional juga menyerap tenaga kerja sebanyak 16 juta orang, baik langsung maupun tidak langsung. "Karena itu, keberlanjutan industri sawit harus tetap dilakukan untuk masa depan sawit yang lebih cerah, yakni melalui ISPO," kata Musdhalifah dalam seminar daring, kemarin.

Luas tutupan sawit RI mencapai 16,38 juta hektare (ha) dengan sebaran yang luar biasa, ini menjadi tantangan penerapan ISPO mengingat kondisi lahan berbeda setiap daerah. Karakter pelaku usahanya juga beragam dan persebarannya banyak di wilayah timur. "Inilah tantangan ISPO, bagaimana luasan sawit yang banyak dan berbeda-beda ini sudah bisa disertifikasi. Kita sudah bagi, mana perkebunan rakyat yang layak ISPO, mana yang masuk masa transisi, semua sudah dikelola dengan baik," jelas dia.

Setelah terjun ke lapangan, tantangan utama yang paling banyak ditemukan terkait ISPO adalah masih banyak perkebunan rakyat yang produktivitasnya rendah dan minimnya penggunaan bibit unggul ditambah ketersediaan terhadap permodalan juga terbatas. Di sisi lain, pemerintah sedang mendorong program PSR yang juga bertujuan membuat sawit berkelanjutan. "Karena itu, ke depan, penerapan ISPO akan mengikuti penerapan PSR sehingga hasilnya memuaskan," ujar dia. (dho) 10-7

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 21/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Apresiasi Bantuan PLN Buat Petani Gubernur Sumsel: Dukung Program Lumbung Pangan

PT PLN (Persero) tak hanya memastikan pasokan listrik andal untuk semua masyarakat. Tetapi ikut terjun mendorong perekonomian masyarakat. Salah satu langkah itu dilakukan perusahaan sterum itu melalui Program *Electrifying Agriculture* untuk membantu petani di Sumatera Selatan (Sumsel). Bantuan senilai Rp 102 juta ini direalisasikan dalam bentuk peralatan pertanian berbasis elektrik.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengapresiasi program *Electrifying Agriculture*. Menurutnya, program itu mendukung Program Lumbung Pangan Nasional di Sumsel. Serta, mendukung pencapaian Sumsel sehingga meraih penghargaan sebagai Provinsi Penghasil Beras IV Besar Nasional.

"Program Listrik Masuk Sawah dan *Electrifying* merupakan program yang sangat inovatif dan dapat direalisasikan di seluruh daerah. Ini merupakan sistem irigasi termurah dan sangat efisien," ujar Deru.

General Manager Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu PLN, Bambang Dwiyanto berharap, bantuan PLN ini dapat memberikan dukungan bagi pertanian di Desa Peracak. Dan memberikan dukungan pada kawasan Lumbung Padi Sumsel dengan menghadirkan listrik ke sentra-sentra pertanian.

"PLN akan terus berupaya menyediakan infrastruktur pendukung pertanian berbasis energi listrik, yang mempermudah petani, menguntungkan secara ekonomi dan tentunya ramah lingkungan," ujar Bambang.

Dia melanjutkan, bantuan tersebut sebagai tahap awal percontohan *Electrifying Agriculture* bagi kawasan pertanian produktif lainnya. "Direncanakan, dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan akan dilakukan *monitoring* dan kajian akan dampak penggunaan peralatan berbasis listrik kepada hasil pertanian," tambah Bambang.

Program *Electrifying Agriculture* di Desa Peracak ini merupakan salah satu Program Bantuan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL), yang merujuk pada Pilar Pembangunan Ekonomi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pemerintah.

Sedangkan bantuan yang diberikan PLN berupa pompa air listrik sebanyak 12 unit untuk menggantikan penggunaan pompa air berbahan bakar minyak, peralatan sinar Ultraviolet (UV) untuk optimalisasi fotosintesis tanaman padi. Dan peralatan pengusir hama (burung dan tikus) elektronik. Bantuan juga meliputi Pemasangan Baru (PB) untuk *Electrifying Agriculture* sebanyak 10 ID pelanggan. ■ IMA PM. 10

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/10/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Bulog Minta Pembenahan Tata Kelola CBP

Bisnis, JAKARTA — Perusahaan Umum Bulog meminta pembenahan pengelolaan cadangan beras pemerintah menyusul kelebihan stok penugasan penyerapan komoditas itu dari negara. 18/10/2021

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan kebutuhan penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) jauh lebih rendah dari volume yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya, Bulog juga memiliki keterbatasan wewenang untuk menyalurkan stok CBP.

Dia mengatakan kebutuhan penyaluran beras untuk sejumlah program yang ditetapkan pemerintah dalam 3 tahun terakhir berkisar 800.000 ton sampai dengan 850.000 ton sedangkan ketentuan stok sebesar 1 juta ton-1,5 juta ton.

"Kami sudah lapor ke Mentan, Mendag, dan Menko Perekonomian agar ke depan pengelolaan CBP dibenahi," katanya, Senin (18/10).

Dalam 2 tahun terakhir, paparnya, Bulog hanya mengandalkan penugasan penyaluran beras untuk bantuan sosial agar stok yang dikelola bisa tersalur dalam jumlah besar.

Di luar itu, penyaluran beras CBP hanya dilakukan lewat program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) atau operasi pasar, beras bantuan bencana, dan penyaluran golongan anggaran.

Sampai saat ini, stok beras yang disalurkan melalui KPSH mencapai

296.742 ton atau sekitar 32.000 ton dalam sebulan. Bulog juga diberi tugas untuk menyalurkan beras bantuan selama PPKM sebesar 200.000 ton pada tahun ini.

"Hasil hitungan kami, penyaluran lewat KPSH, golongan anggaran dan bencana maksimal 850.000 ton per tahun. Bulog hanya punya saluran itu. Di luar itu tidak ada," tambahnya.

Pengelolaan volume yang tepat, lanjut Budi, juga diperlukan untuk menjamin tidak ada beban pengelolaan dan sirkulasi berjalan tepat.

Sebagai komoditas pangan dengan daya simpan terbatas, Budi mengatakan Bulog harus selalu memastikan kualitas beras terjaga dan tidak turun mutu.

Pembenahan tata kelola CBP menjadi salah satu kebijakan publik yang disoroti Ombudsman RI.

Dalam investigasi yang dilaksanakan dalam 5 bulan terakhir, Ombudsman memperoleh 12 temuan masalah dalam pengelolaan CBP.

Masalah tersebut di antaranya soal ketiadaan penetapan volume CBP yang harus dikelola dan pembiayaan yang belum mendukung pengelolaan CBP.

Ombudsman RI mengusulkan sejumlah perbaikan kebijakan terkait tata kelola CBP. Lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik itu mendapati 12 temuan terkait tata kelola CBP setelah melakukan investigasi selama 5 bulan terakhir.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam penyerahan laporan

hasil akhir hasil pemeriksaan (LHAP) kepada pemerintah menjelaskan 12 temuan tersebut dikategorikan dalam lima lingkup.

Dalam ruang lingkup perencanaan dan penetapan CBP, Ombudsman mencatat dua temuan. Yeka mengatakan tidak ada perencanaan pangan nasional dalam tata kelola CBP dan besaran jumlah CBP tidak ditetapkan oleh pemerintah.

Di lingkup pengadaan, Ombudsman mencatat beberapa temuan. *Pertama*, tidak memadainya teknologi pendukung pascapanen. *Kedua*, tidak optimalnya pengadaan beras dalam negeri dan ketiadaan indikator dalam pengambilan keputusan importasi beras. (Ilm Fathimah Timorria)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Ketahanan Pangan Jadi Pilar Penting bagi Indonesia

Food estate merupakan upaya persiapan ketahanan pangan nasional untuk merespons data Food and Agriculture Organization (FAO) terkait peringatan dini dampak pandemi covid-19 terhadap ketahanan pangan.

DESPIAN NURHIDAYAT
despian@mediaindonesia.com

D era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ketahanan pangan mendapat perhatian besar. Itu ditunjukkan dengan diluncurkannya berbagai macam program yang diluncurkan. Bahkan, Presiden dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar penting bagi Indonesia.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan ialah dengan menjalankan program *food estate*. Ini merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan

peternakan di suatu kawasan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan saat ini *food estate* menjadi salah satu program utama yang tengah digarap pemerintah. *Food estate* ini diterapkan di Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Program tersebut merupakan upaya persiapan ketahanan pangan nasional dalam rangka merespons data Food and Agriculture Organization (FAO) terkait peringatan dini dampak pandemi covid-19 terhadap ketahanan pangan.

Mentan menekankan *food estate* merupakan program yang selaras dengan fokus utama dari Kementerian Pertanian, yaitu menciptakan ketersediaan pangan yang memadai untuk seluruh rakyat Indonesia. "Hal ini sejalan dengan tujuan

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|---|---|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 20/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 9 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

pembangunan pertanian nasional, yaitu menyediakan pangan untuk seluruh rakyat, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menggenjot ekspor," ungkap Mentan, Minggu (22/8).

Selain *food estate*, pemerintah juga resmi membentuk Badan Pangan Nasional (BPN). Badan ini terbentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional per 29 Juli 2021. *21/10/10/5*

Berdasarkan Perpres 66/2021 yang diterima *Media Indonesia*, BPN dibentuk dan langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPN memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi, penetapan kebijakan dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga dan pasokan pangan, pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan, pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan, pembenihan, serta bimbingan teknis dan supervisi atas pangan.

Sedidaknya, ada sembilan pangan yang menjadi lingkup pemantauan, tugas, dan fungsi BPN, di antaranya beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Kewenangan pun bisa bertambah sesuai ketetapan Presiden Jokowi.

Holding pangan

Guna mewujudkan ketahanan pangan, Kementerian BUMN juga ikut berperan penting. Pasalnya, beberapa perusahaan BUMN juga bergerak di bidang pangan yang tentu dapat dimanfaatkan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan Kementerian BUMN ialah membentuk *holding* BUMN pangan.

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan proses merger atau pembentukan *holding* BUMN pangan ditujukan terhadap BUMN yang memiliki

fokus bisnis di bidang sama.

Ia mencontohkan penggabungan PT Pertani ke dalam PT Sang Hyang Seri yang sama-sama bergerak di sektor pertanian, PT Perikanan Nusantara (Perinus) yang bergabung dengan PT Perikanan Indonesia (Perindo) yang memiliki fokus perikanan, serta BGR Logistics yang dimerger ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang sama-sama bergerak di sektor perdagangan dan logistik.

Menurut Arya, proses penggabungan BUMN ini juga bagian dalam pembentukan *holding* BUMN pangan yang dipimpin PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Dia juga meyakini proses penggabungan sejumlah BUMN klaster pangan akan memperkuat ekosistem pangan nasional.

"Ini langkah (Menteri BUMN) Pak Erick Thohir supaya satu kesatuan ekosistem dalam membantu industri pangan dan BUMN-BUMN dengan di-*holding* mereka akan lebih fokus, kuat, dan tidak saling bersaing," papar Arya.

Direktur Utama RNI Arief Prasetyo Adi mengatakan setelah beberapa BUMN pangan dilakukan penggabungan, bisnis BUMN pangan diharapkan kian

memperkuat upaya transformasi ekosistem pangan, dari sektor pertanian, sektor perikanan, perdagangan, hingga logistik.

Dengan begitu, penggabungan itu diharapkan bisa saling bersinergi dalam mendukung ekosistem pangan nasional serta meningkatkan manfaat di sepanjang rantai nilai pangan kepada petani, peternak, serta nelayan, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan konsumen.

Penggabungan BUMN ini, lanjut Arief, diharapkan dapat memperkuat untuk menciptakan ekosistem *end to end* pangan nasional. (E-3)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 16/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Pertanian Menjadi Penyelamat, Ekonomi Pulih, Bangsa Kuat

KEMENTERIAN Pertanian terus menciptakan beragam kebijakan dan kerjasama agar sektor pertanian tidak berhenti dan tetap bekerja memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Stimulus dan rencana aksi pun terus dilakukan agar sektor pertanian terus tumbuh positif hingga dapat menjadi "Penyelamat". Harapannya, perekonomian nasional pulih, mampu keluar dari tekanan dan dampak resesi ekonomi global yang berkepanjangan.

Atas dasar tersebut, Kementan telah menetapkan pendekatan lima cara bertindak (CB) melalui peningkatan kapasitas produksi melalui mekanisasi, efisiensi dan pendekatan teknologi tepat guna, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, dan Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks). 11/20/10/10

Untuk mengoptimalkan strategi yang dijalankan, Kementan berkomitmen memperkuat kemitraan, kerjasama dengan stakeholders pertanian. Sinergi tersebut penting dilakukan



DOK KEMANTAN

agar tidak ada lagi ketimpangan pembangunan antar pusat dan daerah, atau daerah dengan daerah lainnya dengan mengoptimalkan keunggulan dan potensi komoditas yang dimiliki masing-masing daerah. Sehingga dalam kurun

dua tahun Pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin, sektor pertanian terus menunjukkan capaian yang positif.

Hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa sektor pertanian di tahun 2020

tumbuh sebesar 1,75 % (yoy), begitupun dengan ekspor pertanian di tahun 2020 tembus hingga Rp 451,77 triliun atau meningkat 15,79 % dibanding tahun 2019.

Pada triwulan I - 2021, sektor pertanian juga tumbuh meya-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |



kinkan sebesar 2,95 (YoY). Pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha di triwulan II 2021, pertanian masih tumbuh 14,27 %. Capaian tersebut merupakan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pengolahan sebesar 19,29%.

Konsistensi kinerja ekspor pertanian secara umum periode Januari-Juli 2021 juga tercatat tumbuh positif, yakni 8,72 persen (yoy). Total ekspor pertanian secara keseluruhan dari Januari hingga Juli 2021 mencapai USD 2,24 miliar. Sedangkan untuk Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan September 2021 mengalami kenaikan 0,96 persen (m to m) atau mencapai 105,68.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan bahwa peran aktif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sangat penting. Apalagi di tengah kondisi bangsa yang tengah memulihkan perekonomian nasional.

"Masing-masing dari kita bisa mengambil peran sesuai kapasitasnya masing-masing. Dan itu bisa dilakukan mulai dari hal yang paling sederhana agar bangsa ini cepat pulih dan menjadi kuat," ungkap Mentan di Jakarta, Selasa, 19 Oktober 2021.

Pada kuartal III tahun 2021, Mentan SYL optimis kinerja sektor pertanian akan terus dijaga performanya walaupun kemampuan APBN terbatas. Oleh karena itu, skema KUR Pertanian menurutnya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani maupun pelaku usaha di bidang pertanian.

"Dengan konsep korporasi mulai dari pendampingan budidaya, hingga pascapanen dan pemasarannya dengan dukungan pembiayaan perbankan melalui KUR, oleh karena itu orientasinya bukan hanya meningkatkan produktivitas semata tapi juga ada nilai tambah bagi petani sehingga kesejahteraan terdongkrak," pungkasnya.

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 21 / 10 / 2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 9 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

PANGAN

Benahi Kelembagaan untuk Perkuat Posisi Petani dan Nelayan

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan lumbung pangan atau *food estate* untuk mencapai kedaulatan pangan nasional perlu diimbangi dengan pembenahan kelembagaan petani dan nelayan. Upaya membangun kedaulatan pangan selama ini belum mampu melepaskan petani dan nelayan dari jerat kemiskinan.

Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, mengemukakan, saat ini sektor pangan nasional masih dihadapkan pada impor bahan pangan dan persoalan kemiskinan produsen. Hampir 40 persen petani dan nelayan masih terjerat kemiskinan. Sementara itu, sebagian bahan pangan masih diimpor karena kebutuhan yang lebih tinggi dari produksi domestik.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan. Potensi produksi lestari perikanan Indonesia mencapai 115,63 juta ton per tahun atau terbesar di dunia. Namun, tingkat pemanfaatan perikanan tangkap dan budidaya baru mencapai 23,33 juta ton pada 2020 atau 20,18 persen dari potensi.

Upaya mendorong produksi pangan memerlukan sejumlah

langkah terpadu hulu-hilir, meliputi revitalisasi usaha, ekstensifikasi lahan pertanian dan perikanan sesuai daya dukung wilayah, diversifikasi pangan, serta pembangunan lumbung pangan. Di sisi lain, diperlukan penerapan teknologi sistem pertanian, pembangunan berkelanjutan, serta pembenahan manajemen rantai pasok.

"Jangan seperti dulu, kita fokus membantu petani dan nelayan dalam produksi, tetapi pasarnya kedodoran sehingga produk ikan dan bawang, misalnya, busuk karena kendala pasar. Petani dan nelayan sulit sejahtera," kata Rokhmin dalam Webinar Food Estate: Mewujudkan Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan yang diadakan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Rabu (20/10/2021).

Pendiri dan Ketua Koperasi BUMR Paramasera Bogor, Agus Somamihardja, mengemukakan, industri pangan Indonesia masih bergantung pada impor. Tahun 2019, nilai impor pangan mencapai Rp 123,5 triliun untuk kebutuhan pangan sehari-hari, seperti gandum yang mencapai 10,6 juta ton senilai 2,7 miliar dollar AS atau 46 persen dari total impor pangan,

Jangan seperti dulu, kita fokus membantu petani dan nelayan dalam produksi, tetapi pasarnya kedodoran.

Rokhmin Dahuri

gula pasir 4,09 juta ton senilai 1,36 miliar dollar AS (18 persen), dan kedelai 2,58 juta ton senilai 1,06 miliar dollar AS (11 persen).

Selain itu, impor buah-buahan mencapai 724.000 ton atau senilai 1,48 miliar dollar AS, sayur-sayuran 770.000 ton senilai 770,1 juta dollar AS, beras 444.000 ton setara 184,4 juta dollar AS, dan daging sapi 262.000 ton atau 829 juta dollar AS. Ikan juga diimpor, seperti ikan lemuru dan ikan pindang.

Sementara itu, petani di Indonesia rata-rata hanya menguasai rata-rata 0,3 hektar lahan per petani dan 96 persen nelayan merupakan nelayan kecil. Efek penguasaan lahan yang sempit dan kapal kecil yang mendominasi perairan menyebabkan petani dan nelayan kecil sulit mengakses manajemen,

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 21/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

teknologi, serta akses pembiayaan. Akibatnya, produktivitas rendah dan sulit bersaing, rantai pasok tidak efisien, dan sering bergantung pada tengkulak. Nelayan hanya menikmati setengah dari harga pasar akibat tata niaga yang panjang.

Konsolidasi

Upaya mendorong kedaulatan pangan memerlukan konsolidasi dari pelaku usaha skala kecil melalui korporasi usaha atau koperasi. Pembenahan kelembagaan petani dan nelayan diperlukan serta inovasi di tengah keterbatasan lahan. Penguatan kelembagaan juga diyakini mampu mengurai rantai pasar yang panjang dan ketergantungan tengkulak.

"Program pemerintah sampai saat ini hanya pada program, tetapi tidak memberdayakan orang. Tak ada inovasi kelembagaan atau korporasi usaha tani. Koperasi perlu diperkuat agar petani dan nelayan memiliki posisi tawar," ujarnya.

Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Ariza Patria, mengemukakan, pemenuhan pangan rakyat sangat strategis dan menyangkut jatuh bangun negara. Pemenuhan pangan dalam negeri juga penting untuk mengantisipasi kebutuh-

an pangan yang makin tinggi.

Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) tahun 2020 menyoroti potensi krisis pangan global dengan menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas pangan dan pertanian. Di tengah pandemi, semakin banyak negara eksportir pangan yang mengurangi ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Indonesia perlu menyikapi potensi krisis pangan dengan tidak berpikir instan dan membuka keran impor untuk pemenuhan pangan dalam negeri," katanya.

Ariza menambahkan, kebijakan *food estate* untuk memperkuat ketahanan pangan nasional memerlukan modal, teknologi, dan sumber daya untuk memenuhi sumber pangan secara terintegrasi. Karena itu, diperlukan partisipasi luas masyarakat agar menjadi gerakan nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan TB Haeru Rahayu mengemukakan, peran perikanan dalam pemenuhan pangan nasional sangat tinggi. KKP tengah memprioritaskan kebijakan penangkapan ikan terukur di seluruh wilayah pengelolaan perikanan RI. (LKT)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

KOMODITAS

Jab dan "Hook" Perdagangan

20/10/21

Belum pulih dari pukulan *uppercut* pandemi Covid-19, perdagangan global kembali menerima jab dan *hook* beruntun. Kenaikan biaya logistik lintas negara yang masih belum terkendali dan harga pangan global yang makin tinggi mulai menggoyang perdagangan sejumlah negara.

Imbasnya dirasakan Indonesia. Lonjakan biaya logistik antarpulau dan harga produk pangan olahan yang dapat memicu kenaikan inflasi sudah di depan mata. Indonesia perlu hati-hati, tidak bisa jemawa, meski neraca perdagangannya surplus selama 17 bulan berturut-turut.

Badan Pusat Statistik mencatat, pada periode Januari-September, neraca perdagangan Indonesia surplus 25,07 miliar dollar AS, berlipat dibandingkan dengan surplus pada periode sama 2020 yang sebesar 13,35 miliar dollar AS. Hal ini terutama disebabkan oleh kinerja positif ekspor nasional yang ditopang kenaikan harga atau siklus superkomoditas, seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan batubara.

Namun, perlu diingat kondisi perdagangan masih jauh dari normal dan penuh ketidakpastian. Pandemi Covid-19 masih membayangi dan disertai berbagai tantangan pemulihan sektor perdagangan. Tantangan itu, antara lain, kenaikan biaya pengapalan kontainer lintas samudra, kelangkaan kontainer dan ruang kapal, serta lonjakan harga pangan.

Biaya pengapalan lintas samudra meningkat dua hingga lima kali lipat dari kondisi sebelum pandemi Covid-19. Kondisi itu dibarengi dengan kelangkaan kontainer dan keterbatasan ruang kapal peti kemas sehingga menyebabkan banyak penundaan pengiriman sejumlah komoditas atau produk unggulan Indonesia, seperti makanan-minuman, mebel dan kerajinan, alas kaki, serta tekstil dan produk tekstil.

Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait berupaya mengatasi masalah itu dengan menyediakan kontainer dan ruang kapal. Bahkan, jika diperlukan, kapal curah dapat disulap sebagai kapal pengangkut produk-produk ekspor ini. Namun, solusi itu menimbulkan masalah lain. Biaya pengapalan kontainer antarpulau di dalam negeri ikut naik. Misalnya, biaya pengapalan Jakarta-Medan naik 46 persen dari Rp 8,75 juta per kontainer menjadi Rp 12,8 juta.

Pukulan lain yang mulai menggoyang perdagangan sejumlah negara adalah kenaikan harga komoditas pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) melaporkan, Indeks Harga Pangan pada September 2021 sebesar 130 atau naik 32,8 persen secara tahunan. Indeks itu merupakan angka tertinggi sejak 10 tahun terakhir. Kenaikan di atas 100 itu sudah terjadi selama 11 bulan terakhir. Lonjakan indeks ini mendorong kenaikan harga sereal, terutama gandum, be-

ras, dan jagung, serta minyak nabati, seperti CPO.

Di satu sisi, Indonesia memetik keuntungan dari kenaikan harga CPO dan batubara, seiring dengan lonjakan permintaan sejumlah negara yang tengah mengalami krisis energi, terutama China dan India.

Sesuai data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, volume ekspor CPO Indonesia ke India melonjak dari 231.200 ton pada Juli 2021 jadi 958.500 ton pada Agustus 2021. Begitu juga ekspor CPO ke China, volumenya naik dari 522.200 ton pada Juli 2021 jadi 819.200 ton pada Agustus.

"Cost-push inflation"

Di sisi lain, Indonesia harus menanggung beban kenaikan harga bahan baku pangan impor yang dibutuhkan industri makanan-minuman. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmimi) mengatakan, harga bahan baku pangan impor, seperti gandum, beras, dan gula, bahkan pewarna dan pengawet makanan, naik 20-30 persen.

Kenaikan harga pangan dan bahan baku pangan impor, serta biaya logistik akan mendorong kenaikan harga pangan olahan. Faktor lain yang akan memengaruhi kenaikan harga pangan olahan adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan. Gapmimi berencana menaikkan harga pangan olahan pada awal 2022 di kisaran 5-10 persen.

Dalam World Economic Outlook "Recovery During a Pandemic: Health Concerns, Supply Disruptions, and Price Pressures", Oktober 2021, Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan, kenaikan biaya logistik, pangan, dan bahan baku pangan, serta krisis energi akan menaikkan inflasi. Negara diharapkan dapat mengendalikannya agar tidak menyebabkan kerawanan pangan, menambah beban rumah tangga miskin, dan berisiko menyebabkan kerawanan sosial.

Penanganan pandemi yang belum merata di sejumlah negara, disertai berbagai pukulan lain, membuat IMF mengoreksi pertumbuhan ekonomi global pada 2021 jadi 5,9 persen dari sebelumnya 6 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga direvisi dari 3,9 persen jadi 3,2 persen.

IMF juga merevisi proyeksi indeks harga konsumen atau inflasi di negara-negara berkembang dari semula 5,4 persen menjadi 5,5 persen pada 2021. Inflasi di Indonesia pada 2021 diperkirakan masih rendah, yaitu 1,6 persen, dan akan meningkat menjadi 2,8 persen pada 2022. Lonjakan harga pangan impor dan biaya pengapalan kontainer sudah terjadi dan bakal berimbas pada inflasi hingga akhir tahun ini.

Tahun depan, dua soal itu, ditambah kenaikan PPN, dapat memicu kenaikan harga pangan, termasuk pangan olahan. Jika hal itu terjadi tanpa disertai perbaikan penghasilan atau daya beli masyarakat, laju pemulihan ekonomi bakal lambat.

Pertumbuhan inflasi yang berkualitas bagi pertumbuhan ekonomi adalah yang berasal dari naiknya permintaan, bukan lantaran tekanan pada produksi dan distribusi (*cost-push inflation*). Tanpa antisipasi dan strategi mengatasi *cost-push inflation* dan perbaikan penghasilan, kombinasi jab dan *hook* (semoga tidak disertai *uppercut*) bisa menambah lebam "wajah" masyarakat dan ekonomi kita. (HENDRIYO WIDH)



HERYUNANTO



SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 21/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Harga Pangan Global dan Ketahanan Pangan Nasional

Lukman Adam

Pusat Penelitian BKD Setjen DPR RI

Lonjakan harga pangan global harus jadi momentum untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Indeks Harga Pangan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO)—yang melacak harga internasional dari komoditas pangan yang paling banyak diperdagangkan secara global—mencapai 130 pada September 2021. Angka ini naik 1,5 poin (1,2 persen) dibandingkan Agustus 2021 dan naik 32,1 poin (32,8 persen) dibandingkan September 2020.

Kenaikan indeks didorong kenaikan harga sebagian besar sereal dan minyak nabati. Harga susu dan produk olahannya (*dairy product*), daging, dan gula juga cenderung menguat. Kenaikan harga pangan juga dipicu menurunnya produksi, meningkatnya permintaan, dan disrupsi rantai pasok.

Di dalam negeri, Bank Indonesia mencatat *volatile food* mengalami deflasi 0,88 persen pada September 2021 dan 0,64 persen pada Agustus. Deflasi dalam negeri dipicu oleh penurunan harga telur ayam ras.

Masih banyaknya komoditas pangan strategis yang diimpor menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya gejolak harga pangan nasional.

Suryana (2014) merumuskan langkah menuju ketahanan pa-

ngan berkelanjutan 2025 melalui peningkatan produksi pangan, diversifikasi pangan berbasis pangan lokal, penyediaan pangan yang cukup dan terjangkau, dan bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan.

Tantangan ketahanan pangan saat ini sudah sangat kompleks. Perubahan iklim bisa memicu gagal panen. Pertumbuhan populasi manusia, kompetisi pemanfaatan sumber daya lahan dan air, dan naiknya pendapatan yang menyebabkan perubahan selera masyarakat juga bisa menjadi ancaman bagi ketahanan pangan nasional.

Memang ketergantungan pada impor beras menurun pada 2019-2020, tetapi untuk komoditas pangan strategis lainnya, seperti kedelai, gula pasir, dan daging sapi, masih tinggi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, tak cukup hanya dengan menaikkan produktivitas pertanian, tetapi juga harus mengubah pola konsumsi masyarakat. Sejumlah langkah sudah dilakukan, tetapi perlu langkah progresif lain untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan.

Pengamanan produksi

Terkait produksi, mempertahankan luasan lahan pertanian dan meningkatkan penggunaan teknologi menjadi penting. Luas lahan sawah tahun 2009 mencapai 8,06 juta hektar (BPS, 2009) dan tahun 2019 tercatat 7,46 juta hektar (Keputusan Menteri Agraria, 2019).

Artinya, terjadi konversi lahan pertanian rata-rata 54.000 hektar per tahun.

Keberadaan UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum mampu mencegah alih fungsi lahan. Beberapa program strategis nasional bahkan berada di daerah yang secara teknis sudah memiliki infrastruktur pertanian komplet sehingga akhirnya mengorbankan lahan pertanian.

Munculnya UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan Perpres No 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah menjadi harapan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian yang memiliki jaringan pengairan lengkap.

Keberadaan program *food estate* (jumbung pangan) merupakan upaya lain menuju ketahanan pangan nasional. Sayangnya, banyak kalangan yang skeptis karena akan menimbulkan krisis baru, krisis lingkungan. Alih-alih mencetak sawah baru, ada pandangan lebih baik mempertahankan luasan lahan pertanian pangan yang ada sekarang, dengan memberikan sejumlah insentif pada petani dan meningkatkan koordinasi dengan pemda untuk mempercepat penetapan lahan sawah yang dilindungi.

Subsidi alat dan mesin pertanian (*alsintan*) melalui mekanisme kredit usaha rakyat (KUR) yang dimulai sejak 2020 perlu diperluas.



HERYUNANTO

Limbah pangan

Penganeekaragaman pangan lokal, terutama nonberas dan nonterigu berbasis sorgum, singkong, sagu, dan ubi jalar yang melimpah produksinya di dalam negeri, harus terus dilakukan. Tujuannya, untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pada satu jenis sumber pangan. Biasanya industri berbasis pangan lokal merupakan industri rumahan sehingga diperlukan promosi dan pendampingan agar memenuhi persyaratan izin edar dan keamanan pangan. Selain itu, pemanfaatan KUR untuk modal usaha.

Kajian Bappenas dan World Resources Institute mengungkapkan, kehilangan dan pemborosan pangan (*food loss and waste/FLW*) di Indonesia tahun 2000-2019 berkisar 23-48 juta ton per tahun atau setara 115-184 kilogram per kapita per

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 21/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

tahun. Dampaknya bagi ekonomi berupa kehilangan produk domestik bruto sebesar 4-5 persen atau senilai Rp 213 triliun-Rp 551 triliun per tahun.

Selain itu, ada dampak lingkungan, karena FLW menghasilkan gas rumah kaca. Mayoritas sampah makanan berasal dari padi-padian (38,72 persen), daging (25,15 persen), dan produk makanan yang berasal dari tepung terigu (18,74 persen).

Padahal, FLW ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan. Bappenas (2021) dan Suryana *et al* (2021) menyebutkan prevalensi penduduk rawan pangan di Indonesia masih 5,12 persen (2020) dan prevalensi kurang gizi mencapai 8,34 persen (2020).

Di AS dan China, kampanye terkait FLW sudah lebih maju. AS sudah merencanakan mengesahkan UU tentang Zero FLW. Tujuannya, mengurangi separuh kehilangan dan limbah

pangan pada 2030 dan mengurangi dampaknya pada iklim.

China, sejak 29 April 2021, memiliki UU tentang limbah pangan (FLW). UU ini mengatur larangan pembuatan dan penyebarluasan video pesta makan yang berlebihan atau *mukbang*. Ada pengenaan biaya tambahan jika tak menghabiskan makanan yang dipesan, dan denda kepada restoran yang konsisten membuang makanan dalam jumlah besar. Ini akan mengubah budaya masyarakat China, yang justru menganggap tak sopan menghabiskan makanan yang dihidangkan.

Kampanye Zero FLW sudah harus dimulai dari rumah tangga, tempat kerja, hotel, dan restoran. Peran pemda juga penting, melalui keberanian memberikan denda bagi rumah tangga dan restoran yang membuang limbah pangan dalam jumlah tertentu. Pemilahan sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir juga harus dilakukan.